

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu

Pelayanan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan manajemen kebencanaan yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Ketiga tahapan tersebut saling terintegrasi dalam upaya mitigasi serta adaptasi terhadap bencana. Secara garis besar, upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu difokuskan pada pendekatan non-struktural.

Bencana sendiri merupakan peristiwa yang menuntut pelaksanaan fungsi manajerial secara berkelanjutan dalam setiap tahap penanggulangannya, mulai dari pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, seluruh potensi yang tersedia, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural, dioptimalkan untuk melindungi masyarakat secara maksimal, meminimalkan jumlah korban, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Dasar Hukum dan Pembentukan BPBD Kota Bengkulu

BPBD Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010, yang mengatur tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, struktur organisasinya ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Tugas Pokok BPBD Kota Bengkulu

Sebagai perangkat daerah, BPBD Kota Bengkulu memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain:

Menetapkan pedoman dan arahan penanggulangan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata;

Menentukan standar dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan hukum;

Menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan peta kawasan rawan bencana;

Menyusun serta menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kota Bengkulu;

Menyampaikan laporan kegiatan penanggulangan bencana kepada Walikota secara berkala setiap bulan dalam keadaan normal dan setiap saat pada kondisi darurat;

Mengelola pengumpulan serta penyaluran bantuan berupa uang dan barang;

Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Kota Bengkulu

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, BPBD Kota Bengkulu memiliki fungsi utama sebagai berikut:

Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif, dan efisien;

Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan terpadu.

Struktur Organisasi BPBD Kota Bengkulu

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Bengkulu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Pelaksana

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun struktur Sekretariat terdiri atas:

Sub Bagian Umum

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang (Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala BPBD menunjuk seorang Kepala Pelaksana yang juga bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana kemudian dibantu oleh satu kepala bagian serta tiga kepala bidang, yang masing-masing memimpin unit kerja sesuai bidangnya dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

B. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

Tabel. 3.1

Jumlah Pegawai BPBD

Berdasarkan Status Kepegawaian Dan Jenis Kelamin

No.	PEGAWAI	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
A. Pegawai Negeri Sipil				
1.	Kepala Pelaksana	1	0	1

2.	Sekretariat	2	7	9
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	1	6
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	8	1	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	1	5
B. Pegawai Kontrak				
1.	Tenaga Kontrak	15	6	21
Total		35	16	51

Sumber: Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

Jumlah ASN pada BPBD dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 6 orang (21 %) golongan IV, 17 orang (55 %) golongan III dan sisanya 7 orang (24 %) golongan II.⁶⁴

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penangngulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

1. Tantangan Badan Penangngulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu menghadapi sejumlah

⁶⁴ Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

tantangan strategis yang memengaruhi efektivitas kinerjanya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Kondisi Geografis dan Topografi

Kota Bengkulu memiliki karakteristik geografis dan topografi yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Wilayah ini memiliki cakupan yang cukup luas dengan potensi bencana yang beragam seperti gempa bumi, tsunami, kekeringan, abrasi pantai, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran. Keberagaman dan kompleksitas potensi bencana tersebut menuntut penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Penanggulangan bencana sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun dalam praktiknya, peran aktif masyarakat masih minim dan cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan kebencanaan kepada pemerintah, yang berimplikasi pada kurang optimalnya program mitigasi dan adaptasi berbasis komunitas.

3. Belum Menjadi Prioritas Utama

Meskipun penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pemerintah daerah, implementasinya belum menjadi prioritas utama di berbagai sektor pembangunan.

Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, keberadaan BPBD baru mendapatkan perhatian serius ketika terjadi bencana.

4. Tingkat Kerawanan yang Tinggi

Tingkat kerawanan terhadap bencana di Kota Bengkulu tergolong tinggi, baik dari aspek bencana alam maupun non-alam. Dengan cakupan wilayah yang luas, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pemantauan, koordinasi, serta penyusunan strategi penanggulangan yang efektif.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

BPBD Kota Bengkulu masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang penanggulangan bencana. Minimnya tenaga ahli berdampak pada terbatasnya kapasitas institusi dalam melakukan perencanaan dan penanganan yang profesional.

6. Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana

Saat ini, terdapat pergeseran paradigma dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini menuntut peran aktif masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana untuk terlibat dalam penyusunan program-program

penanggulangan bencana yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

7. Partisipasi Dunia Usaha yang Belum Optimal

Kontribusi sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung penanggulangan bencana masih belum dikelola secara menyeluruh dan terpadu, terutama dalam fase prabencana dan pascabencana. Sebagian besar dukungan dari dunia usaha masih terfokus pada kegiatan tanggap darurat, bukan pada upaya preventif atau pemulihan jangka panjang.

2. Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa peluang tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan ruang bagi inovasi dalam bidang kebencanaan. Teknologi informasi dan komunikasi, sistem peringatan dini, serta pemetaan berbasis digital dapat digunakan secara optimal untuk mengidentifikasi risiko dan mempercepat respon terhadap kejadian bencana.

2. **Koordinasi Antarlembaga yang Semakin Terintegrasi**
Tersedianya sinergi dan koordinasi antara BPBD Kota Bengkulu dengan perangkat daerah lainnya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa membuka peluang terciptanya sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan menyeluruh, baik dalam tahap mitigasi, tanggap darurat, maupun rehabilitasi.
3. **Dukungan dari Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah**
Peran aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi kekuatan penting dalam upaya penanggulangan bencana. Keterlibatan mereka dapat membantu memperluas jangkauan informasi, memperkuat jejaring komunitas tangguh bencana, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko bencana.
4. **Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**
Adanya peluang untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun instansi terkait menjadi faktor pendukung dalam membangun profesionalisme lembaga.
5. **Partisipasi Aktif Warga dalam Upaya Mitigasi**
Kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh untuk ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dapat dimanfaatkan sebagai basis pendekatan berbasis komunitas.

Partisipasi ini akan memperkuat daya tahan masyarakat lokal terhadap berbagai bentuk bencana.

6. **Penyempurnaan Konsep Teknis Penanggulangan Bencana**
Inovasi dalam pengembangan konsep dan metode teknis penanggulangan bencana yang lebih tepat guna dan sesuai dengan karakteristik lokal menjadi peluang tersendiri dalam peningkatan efektivitas pelayanan.
7. **Dukungan Lintas Sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Meningkatnya perhatian lintas sektor dan komitmen OPD lain dalam mengalokasikan anggaran dan program yang berorientasi pada kebencanaan memperkuat pendekatan multisektor. Hal ini mendorong terciptanya kolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

D. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bpbd Kota Bengkulu

Pembangunan nasional dan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan lintas sektor yang berkesinambungan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kota Bengkulu sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, hingga global.

Secara geografis, Kota Bengkulu berada dalam kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam, khususnya

karena letaknya yang berdekatan dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Andaman. Dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak mengenal batas wilayah, hal ini menempatkan Kota Bengkulu pada posisi strategis namun sekaligus rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, dinamika global, serta risiko bencana berbasis alam maupun non-alam.

Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Bengkulu, khususnya di sektor kebencanaan, adalah tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB), kerugian ekonomi yang signifikan akibat bencana, serta jumlah penduduk yang berisiko terdampak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mengarah pada pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi secara sistematis.

Salah satu akar persoalan utama dalam penanggulangan bencana di Kota Bengkulu adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebencanaan. Untuk itu, arah kebijakan yang perlu diambil meliputi:

Penguatan Aspek Kelembagaan dan Kebijakan

Meningkatkan sinergi kelembagaan, regulasi, dan tata kelola kebencanaan agar lebih responsif terhadap dinamika bencana.

Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Menyusun perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko yang memperhatikan kerentanan wilayah dan kapasitas masyarakat.

Pengembangan Sistem Informasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Logistik

Memperkuat sistem informasi bencana, penyediaan pelatihan kebencanaan secara reguler, dan manajemen logistik yang efisien.

Penanganan Spesifik pada Kawasan Rawan Bencana

Melakukan identifikasi dan intervensi pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi secara tematik dan berkelanjutan.

Meningkatkan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Melalui penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan pendekatan teknologi untuk memperkecil dampak bencana.

Kesiapsiagaan dan Respons Darurat yang Efektif

Membangun sistem peringatan dini, serta memperkuat kapasitas tanggap darurat di tingkat masyarakat dan kelembagaan.

Sistem Pemulihan yang Tangguh dan Berkelanjutan

Menyusun mekanisme pemulihan pasca bencana yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika sosial.

Di sisi lain, pertumbuhan Kota Bengkulu sebagai kota jasa, perdagangan, dan industri turut mendorong perubahan dalam struktur dan pemanfaatan ruang. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, kegiatan ekonomi, dan fasilitas publik telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, termasuk konversi kawasan hutan kota dan sempadan sungai.

Permasalahan seperti:

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang,

Pemanfaatan kawasan lindung untuk pertanian dan pembangunan permukiman,

Minimnya kepastian status kepemilikan lahan, menjadi isu lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana.

Perubahan penggunaan lahan produktif dan kawasan lindung tanpa memperhatikan prinsip konservasi juga menyebabkan meningkatnya lahan kritis dan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini memperkuat urgensi penguatan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan tersebut, isu strategis utama yang harus dijadikan dasar program dan kegiatan BPBD Kota Bengkulu untuk periode 2024-2026 adalah optimalisasi pembangunan infrastruktur

kebencanaan yang berkelanjutan, yang berpijak pada prinsip pembangunan rendah emisi dan berketahanan terhadap risiko bencana.

